

ABSTRAK

Adanya desentralisasi fiskal menjadikan pemerintah daerah lebih responsif terhadap preferensi daerah. Pemerintah daerah dinilai lebih efisien dalam menyediakan layanan publik karena memiliki keunggulan informasi yang lebih baik mengenai selera dan preferensi daerah dibandingkan pemerintah pusat sehingga meningkatkan kinerja sektor publik. Penelitian ini menganalisis secara empiris hubungan antara desentralisasi fiskal dan kinerja sektor publik bidang kesehatan dan pendidikan menggunakan data panel dari 428 kabupaten/kota di Indonesia selama periode tahun 2011 hingga 2015. Studi ini mengukur desentralisasi fiskal menggunakan persentase pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan kabupaten/kota dan persentase dana alokasi umum terhadap total pendapatan kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan angka harapan hidup dan angka partisipasi murni sekolah menengah pertama (SMP) untuk mengukur kinerja kesehatan dan kinerja pendidikan. Hasil estimasi menggunakan *fixed-effects model*, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang diukur dengan persentase pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan kabupaten/kota berkorelasi positif dengan kinerja sektor publik bidang kesehatan dan pendidikan. Sebaliknya, indikator desentralisasi fiskal yang diukur dengan persentase dana alokasi umum terhadap total pendapatan kabupaten/kota berkorelasi negatif dengan kinerja sektor publik bidang kesehatan dan pendidikan.

Kata kunci : Desentralisasi Fiskal, Kinerja Sektor Publik, Angka Harapan Hidup, Angka Partisipasi Sekolah